

Judul : Parlemen Asia Tenggara Perkuat Etika dan Integritas
Tanggal : Rabu, 27 Agustus 2014
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Parlemen Asia Tenggara Perkuat Etika dan Integritas

JAKARTA-GOPAC Indonesia akan memanfaatkan momentum penyelenggaraan lokakarya (workshop) yang digelar oleh South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) di Jakarta, 28-29 Agustus 2014. Momentum itu sebagai upaya mendapatkan pemahaman dan pengalaman komprehensif dari rekan-rekan anggota parlemen di Asia Tenggara dalam memperkuat etika dan integritas mereka sebagai wakil rakyat.

Anggota parlemen adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan dan kepentingan. Bila hal ini tidak dilengkapi dengan standar etika yang tinggi dan integritas yang kuat, maka, konflik kepentingan dan korupsi pun terbuka luas.

Untuk diketahui, SEAPAC, sebuah cabang dari aliansi global anggota parlemen dalam perang melawan korupsi, GOPAC, akan menggelar workshop dengan tema Stronger Ethics and Integrity: Path for Parliament to Combat Corruption.

Sementara saat ini, melalui DPR, Indonesia menjabat keketuaan SEAPAC. "Untuk itu, kita memanfaatkan momen ini sebagai upaya menyerap wawasan dalam hal etika dan integritas," kata Ketua GOPAC Indonesia, Dr Pramono Anung di Jakarta, kemarin.

SEAPAC merencanakan mengundang beberapa narasumber untuk berbicara dalam workshop tersebut. Mereka adalah Brig Gen. Sk. Abu Bakr, dari GOPAC Parliamentary Ethics and Conduct Global Task Force (GTF-PEC), Mr. OseiKyei-Mensah-Bonsu dari GOPAC Board of Directors, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perwakilan Transparency International (TI), National Democratic Institute (NDI) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Workshop sendiri akan digelar di Hotel Intercontinental, Jakarta dengan peserta anggota parlemen dari Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan Brunei Darussalam.

Bagi GOPAC Indonesia, tema tersebut sangat relevan mengingat anggota parlemen termasuk di Indonesia memiliki beragam tantangan dalam pemberantasan korupsi, termasuk etika dan integritas. Dalam level tertentu, etika dan integritas tergolong abstrak. "Tetapi di sisi lain, banyak kode etik yang tersebar dalam berbagai peraturan di Indonesia," urainya.

Tema tersebut juga berkaitan erat dengan wacana yang berkembang di Indonesia mengenai kodifikasi beragam kode etik dalam sebuah undang-undang tentang Etika Penyelenggara Negara. Tema juga berkaitan erat dengan bagaimana parlemen menjaga dan mempertahankan marwah lembaganya melalui upaya penguatan etika dan integritas ini.

DPR dapat berbagi kisah, sekaligus memetakan tantangan yang ada dalam upaya menjaga kredibilitas anggotanya sejalan

dengan perubahan Badan Kehormatan menjadi Mahkamah Kehormatan. "Kita dapat mengeksplorasi beragam masukan dari pakar dan rekan anggota parlemen yang tergabung dalam SEAPAC," tukasnya.

Kode etik menawarkan standar etika yang jelas dan titik acuan yang warga negara dan pemerintah, serta dapat digunakan untuk menilai perilaku pejabat publik. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang menggarisbawahi kebutuhan untuk memiliki kode etik bagi pejabat publik. Kode etik tersebut dapat membantu untuk membangun suasana etika, baik itu di parlemen atau di pemerintahan.

Pertemuan ini signifikan bagi anggota SEAPAC dalam berbagi kisah mengenai bagaimana kode etik dan integritas anggota parlemen dikembangkan dalam masing-masing parlemen. "Kami juga ingin mengetahui lebih jauh dari badan PBB seperti UNODC mengenai konteks internasional dari kode etik, termasuk yang tertuang dalam UN International Code of Conducts for Public Officials," lanjut Pramono.

Selain workshop, SEAPAC juga akan menggelar rapat pengurus (Board Meeting) untuk membicarakan beragam isu-isu keorganisasian ke depan. Salah satu isu yang munculkan dalam aspek organisasi ini adalah mengenai tindak lanjut dari SEAPAC Action Plan yang disetujui di Manila, 2013 silam dan Medan Declaration yang disepakati pada tahun yang sama.

GOPAC merupakan aliansi internasional anggota parlemen yang fokus pada upaya pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum. Berpusat di Ottawa, Kanada, GOPAC saat ini memiliki 48 gugus tugas nasional di lima benua.

DPR RI telah memiliki gugus tugas nasional GOPAC dengan ketua Dr. Pramono Anung Wibowo, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

bidang Korinbang. Saat ini sekitar 39 orang anggota DPR RI lintas komisi dan lintas fraksi tergabung dalam gugus tugas nasional tersebut.

Sementara SEAPAC merupakan gugus tugas regional GOPAC di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari gugus tugas nasional parlemen Malaysia, Filipina, Timor Leste dan Indonesia. Laos, Thailand dan Kamboja sedang mempersiapkan pembentukan gugus tugas nasional di parlemen masing-masing.

Pramono melanjutkan, ada tiga sektor utama di

lembaga parlemen yang menjadi wilayah berpotensi rawan korupsi. Berdasarkan temuan hasil kerja sama antara Bank Dunia dan KPK sektor-sektor yang masuk dalam peta rawan korupsi adalah bagian penganggaran, pengawasan, dan legislasi.

Tiga sektor rawan korupsi di lembaga parlemen itu memiliki beberapa titik yang berpotensi untuk dapat dijadikan 'ladang' korupsi. Misalnya, potensi korupsi di sektor penganggaran ada tiga poin, yaitu penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, pembicaraan tingkat I dan pembahasan anggaran, dan penetapan APBN-P.

Sementara itu, kata dia, dari sektor pengawasan, beberapa poin yang berpotensi rawan korupsi adalah titik parameter pengawasan, akuntabilitas pengawasan, serta pengangkatan pejabat publik. "Ini merupakan potensi korupsi pada bagian-bagian di parlemen, namun itu tidak hanya di parlemen di Indonesia, tetapi juga di parlemen negara-negara lain," katanya. Pada sektor legislasi, ada tujuh titik rawan korupsi, antara lain pada penyusunan materi program legislasi nasional (prolegnas) dan penyusunan rancangan undang-undang pada badan legislasi, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), pengambilan keputusan, pengesahan undang-undang. "Jadi, kalau melihat peta rawan korupsi dari Bank Dunia, inilah yang diangkat menjadi materi bahasan dalam konferensi SEAPAC dan GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption)," kata Pramono.

Karena itu momentum GOPAC ini sebagai upaya mendapatkan pemahaman dan pengalaman komprehensif dari rekan-rekan anggota parlemen di Asia Tenggara dalam

memperkuat etika dan integritas mereka sebagai wakil rakyat. (dms)

